

DELEGITIMASI DEMOKRASI OLEH ORGANISASI MUSLIM REVIVALIS: PENDEKATAN ANALISIS WACANA

DELEGITIMATION AGAINST DEMOCRACY BY REVIVALIST- MUSLIM ORGANIZATION: DISCOURSE ANALYSIS APPROACH

Karman

Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Jakarta
Jalan Pegangsaan Timur No. 19 B Jakarta Pusat Kode Pos : 10320. Telp/Fax : (021)31922337
email : karman@kominfo.go.id

(Diterima: 23 Juni 2015; Direvisi: 02 Agustus 2015; Disetujui terbit: 11 Agustus 2015)

Abstrak

Indonesia sebagai negara demokrasi mendapat tantangan dari organisasi Islam-revivalis, salah satunya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebagai organisasi Islam-revivalis, HTI menolak demokrasi, hermeneutika, pluralisme/relativisme, persamaan *gender* dan cenderung bersifat oposisionalisme. HTI melakukan eksternalisasi wacana antidemokrasi di halaman *website*-nya, hizbut-tahrir.or.id. Tulisan ini akan membahas wacana delegitimasi tersebut dari sudut apa yang menjadi alasan HTI mendelegitimasi demokrasi dalam wacana di situs HTI. Waktu penelitian ini tahun 2014. Artikel yang dijadikan unit analisis tidak dibatasi menurut waktu tapi berdasarkan diskursus yang terjadi. Penelitian ini juga mengidentifikasi kata-kata yang digunakan untuk mendelegitimasinya. Dengan analisis isi kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa HTI menolak karena dua alasan pokok, sosial-ekonomi dan alasan teologi. Dari aspek sosial-ekonomi, HTI menolak demokrasi karena demokrasi tidak menciptakan kesejahteraan. Mereka yang sejahtera adalah penguasa dan pengusaha. Demokrasi menjadi alat bagi mereka untuk menguras kekayaan alam negeri dan melindungi kepentingan Amerika. Dari aspek teologis, HTI menolak demokrasi karena demokrasi menggiring ke perbuatan *syirik* (mengambil hak Allah sebagai pembuat aturan hukum). Demokrasi menjadikan pemimpin mengabaikan nilai-nilai spiritual. Bahasa yang digunakan dalam mendelegitimasi wacana demokrasi adalah dengan mengatakan bahwa demokrasi: sistem haram, sistem najis, sistem kufur, *tasyabbuh bil kuffar*, memiliki cacat bawaan, sistem rusak dan merusak, lokomotif yang membawa gerbong-gerbong kemaksiatan, kemungkar, dan kezaliman. Selain itu, demokrasi memberi jalan lahirnya pemimpin boneka.

Kata kunci: wacana delegitimasi, demokrasi, organisasi muslim revivalis.

Abstract

Indonesia as a democratic country gets challenge from revivalist-muslim organizations, one of them is Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). As a revivalist-muslim organization, HTI denies democracy, hermeneutics, pluralism/relativism, and gender equality. It externalizes its antidemocratic discourse in its websites, hizbut-tahrir.or.id. This article deals with its democracy delegitimation discourse by emphasizing its reason. This research also identifies words HTI use in delegitimizing democracy. This one makes-up qualitative content analysis. This research was conducted during 2014. The articles as analysis units are not limited on the basis of time, but on the basis of discourse instead. The analysis shows that HTI denies democracy because of two aspect: social-economy and theology one. In social-economy, HTI thinks that democracy does not create a welfare. Those who in welfare are the powerful/political elites and the haves/capitalists. Democracy becomes their instrument to exploit natural resources and protect US's interest. In theology, HTI disagrees democracy because it drives peoples into syirik (replace Allah's role as The ruler). Democracy triggers leaders to abandon spiritual values. Words used to delegitimize democracy are: haram/illicit system, dirt system, kuffur system, tasyabbuh bil kuffar (following Islam-disbelievers), having an innate defect, depraved-and-depraving system, a locomotive carrying sinful action/immorality, God'law violation, and despotism. Moreover, democracy gives a way for pseudo leader to emerge

Keywords: delegitimation discourse, democracy, revivalist-muslim organization.

PENDAHULUAN

Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan sebagai negara demokrasi terbesar di dunia Islam, Indonesia menyelenggarakan pemilihan umum secara rutin. Dalam meniscayakan bahwa wakil rakyat dalam pemerintahan harus dipilih dan digantikan secara teratur serta adil (Gaffar 1996, 6-7). Demokratisasi sebagai bagian dari pembangunan sistem sosial politik tidak bisa lepas dari peran agama yang memberikan identitas sosio-kultural anggota masyarakat. Ini diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Liddle dan Huntington (1963-1964) di daerah Pematang Siantar. Hasil penelitian Liddle menunjukkan bahwa warga Pematang Siantar di Tapanuli Utara memilih Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Sementara itu, warga Tapanuli Selatan memilih Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi. Huntington juga menemukan bahwa proses demokratisasi di Korea Selatan berpengaruh kepada konversi dari agama Budha ke Agama Kristen karena dianggap lebih akomodatif dalam menghadapi dinamika politik dan proses demokratisasi (Huntington 1995, 110). Demokrasi di Indonesia direspon secara berbeda oleh kelompok Islam di Indonesia. Secara umum, kelompok ini dapat dibagi dua yaitu kelompok Islam yang menerima demokrasi dan kelompok Islam yang menolak demokrasi (Haqqani 2013, 7). Kelompok atau komunitas umat Islam yang menerima sistem demokrasi sering disebut kelompok Islam moderat atau kelompok substansialis. Sebaliknya, kelompok Islam yang menolak sistem demokrasi sering disebut kelompok fundamentalis atau istilah serupa. Mereka menolak demokrasi karena ideologi atau

nilai berasal dari Barat, bukan nilai-nilai yang diderivasi atau berasal dari ke-Tuhan-an (kitab suci). Prinsip kelompok Islam revivalis adalah melawan (*fight*) kelompok yang mengancam keberadaan mereka, berjuang untuk (*fight for*) menegakkan cita-cita yang mencakup persoalan hidup secara umum, berjuang dengan (*fight with*) nilai-nilai identitas tertentu, melawan (*fight against*) musuh-musuh dalam bentuk komunitas atau tata sosial keagamaan yang dipandang menyimpang, serta berjuang atas nama Tuhan (*fight under*) (Taher 1998, xix). Jadi secara konsep, menurut Castells (1997), kelompok revivalis adalah orang yang selalu mengidentifikasi diri, kehidupan dengan nilai-nilai yang berasal dari nilai-nilai agama (teologi). Sementara itu, demokrasi adalah sistem yang diterapkan di Indonesia yang kini menjadi sistem dominan dalam kehidupan sosial politik berasal dari pandangan hidup (*welthanscauung*) di luar Islam (Castells 1997).

Dengan demikian, ada benturan ideologi antara negara Indonesia dan kelompok revivalis. Ada masalah atau isu tentang nasionalisme dengan isu ke-*ummat*-an di sini. Salah satu organisasi Islam revivalis-politis yang bersifat transnasional yang eksis di Indonesia pascareformasi adalah HTI. Organisasi ini melakukan penolakan demokrasi melalui produksi wacana yang disebarluaskan melalui laman *website*-nya. Wacana HTI yang dieksternalisasikan ke publik adalah wacana antidemokrasi dan negara Islam yang mereka sebut dengan *khilafah islamiyah*. Untuk tujuan tersebut, HTI mendelegitimasi sistem demokrasi di Indonesia serta produk yang dihasilkan dari sistem tersebut.

Tulisan ini akan membahas wacana delegitimasi tersebut dari sudut apa yang

menjadi alasan HTI mendelegitimasi demokrasi baik sebagai ideologi dan sistem yang digunakan di Indonesia. Penelitian ini ingin mengidentifikasi kata-kata yang digunakan untuk mendelegitimasi demokrasi.

LANDASAN TEORI

Wacana sebagai produk konstruksi dan alat delegitimasi. Setiap tindakan komunikasi senantiasa mengandung kepentingan termasuk komunikasi melalui internet seperti halaman *website*. Jadi, setiap tindakan komunikasi adalah suatu *Discourse* (dengan “D” besar). Dalam pandangan *communication as Discourse* ini, komunikasi dilakukan dalam rangka menciptakan “kenyataan lain” atau “kenyataan kedua” dalam bentuk wacana (*discourse*) dari “kenyataan yang pertama”. Cara yang ditempuh dalam pembentukan wacana (realitas kedua) itu adalah sebuah proses yang disebut konstruksi realitas atau *construction of reality*.

Salah satu teori *discourse* yang sangat relevan dengan teori komunikasi berasal dari James P. Gee. Ia membedakan *discourse* ke dalam dua jenis: Pertama, “*discourse*” (d kecil) yang melihat bagaimana bahasa digunakan pada tempatnya (*on site*) untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas atas dasar-dasar linguistik. Kedua, “*Discourse*” (D besar) yang merangkaikan unsur linguistik pada “*discourse*” (dengan d kecil) bersama-sama unsur non-linguistik (*non-language stuff*) untuk memerankan kegiatan, pandangan, dan identitas. Bentuk unsur non-linguistik (*non-language stuff*) ini dapat berupa kepentingan ideologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan internet yang muncul

sebagai wahana atau media, kelompok atau organisasi muslim-revivalis menjadikan internet sebagai sarana untuk melakukan kritik dan alat untuk menandingi delegitimasi sistem demokrasi sebagai ideologi negara yang dominan. Proses delegitimasi ini berjalan secara efisien dan memiliki jangkauan luas tanpa batas (*borderless*) (Gee 2005, 26).

Dalam pembahasan wacana media sebagai alat untuk mendelegitimasi, kita dapat merujuk ke teori delegitimasi. Teori delegitimasi ini lazim dikenal dalam teori-teori *postmodernisme* (sering juga disinonimkan dengan *poststrukturalisme*). Teori ini menandai jatuhnya pamor metanarratif/*grand narrative*, atau teks-teks besar yang dulu diagungkan. Di sisi lain, teks-teks kecil (*petite narratives*) yang dulu dipinggirkan atau dianggap tidak penting mulai bangkit dan merebut posisi yang baik. Suara yang secara historis terpendam oleh kebesaran teks-teks agung, bangkit dan menemukan dirinya kembali (Storey 2001, 151).

Lyotard mengatakan bahwa *postmodernisme* ditandai dengan runtuhnya narasi-narasi besar yang bersifat universal dengan segenap hak-hak istimewanya untuk mengatakan (baca: memonopoli) kebenaran. Sebagai gantinya, kita akan menyaksikan semakin nyaringnya berbagai ragam suara-suara dari pinggiran, dengan segenap perbedaan dan keanekaragaman budaya (Storey 2001, 150). Kritik terhadap narasi besar (*grand narratives*) atau metanarasi berasal dari pemikiran Jean-François Lyotard ini umumnya berkisar tentang posisi pengetahuan, khususnya tentang cara ilmu dilegitimasi melalui yang disebutnya sebagai “narasi besar” (*grand narrative*), seperti kebebasan, kemajuan, emansipasi kaum proletar, dan sebagainya.

Demokrasi dalam hal ini sebagai pengetahuan yang dilegitimasi melalui aparat-aparat negara (Komisi Pemilihan Umum, lembaga legislatif, undang-undang, dan produk hukum lainnya), serta dilegitimasi oleh atmosfer politik global. Menurut Lyotard, narasi-narasi besar ini telah mengalami nasib yang sama dengan narasi-narasi besar sebelumnya seperti religi (baca: agama Kristen), negara-kebangsaan, kepercayaan tentang keunggulan Barat, dan sebagainya dimana mereka pun kini menjadi sulit untuk dipercaya. Dengan kata lain, dalam abad ilmiah ini, narasi-narasi besar menjadi tidak mungkin, khususnya narasi tentang peranan dan kesahihan ilmu itu sendiri. Dalam kerangka ini pula, aspek mendasar yang dikemukakan oleh Lyotard pada dasarnya merupakan upaya tentang kemustahilannya membangun sebuah wacana universal nalar sebagaimana diyakini oleh kaum modernis (Sindhunata 1993, 56).

Dari perspektif Lyotard ini, dapat dipahami bahwa *postmodernisme* adalah usaha penolakan dan bentuk ketidakpercayaan terhadap segala “narasi besar”, filsafat modern; penolakan filsafat metafisis, filsafat sejarah, dan segala bentuk pemikiran yang totalistik seperti hegelianisme, liberalisme, marksisme, atau apapun. Dengan demikian, *postmodernisme* menolak pemikiran yang totaliter, juga mengimplikasikan dan menganjurkan kepekaan terhadap perbedaan dan memperkuat toleransi terhadap kenyataan yang tak terukur (Suseno 1999, 60).

Lyotard merujuk ke ‘*delegitimation*’ sebagai perlawanan dari apa yang disebut olehnya dengan istilah

‘*grand narrative*’, yang muncul ketika pertanyaan diajukan berkaitan dengan legitimasi pengetahuan (*legitimation of knowledge*), yaitu dengan mencari penyebab atau akar dari ‘*grand narrative*’ itu sendiri. Pengetahuan (baca: demokrasi) diapresiasi manakala ia mengalami reduplikasi diri melalui produksi diskursus (Lyotard 1986, 38). Ia mengatakan bahwa dalam abad modern ilmu pengetahuan (*science*) yang mengklaim dirinya sebagai satu-satunya jenis pengetahuan yang valid tidak dapat melegitimasi klaimnya itu karena aturan main sains bersifat inheren dan ditentukan oleh konsensus di antara para ilmuwan itu sendiri. Sains melegitimasi dirinya secara konkret dengan bantuan beberapa narasi besar (*grand narratives*). Ilmu pengetahuan (*science*) jika tidak memperoleh legitimasi maka ia bukanlah ilmu pengetahuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan kondisi faktual yang terjadi pada wacana di HTI. Pendekatan (*approach*) ini adalah pendekatan analisis isi kualitatif dengan tidak menekankan pada kuantitas kata dalam satu teks berita atau artikel tapi menekankan tema/topik sebagai diskursus yang muncul di situs HTI tersebut.

Sumber data pada penelitian ini adalah teks di situs HTI, (hizbut-tahrir.or.id), yang dipublikasikan tahun 2014. Teks di situs tersebut dicari dengan kata kunci (*keyword*) “demokrasi”. Peneliti memilih hasil pencarian tersebut dalam batasan teks yang mengkritik atau mendelegitimasi demokrasi sebagai sistem atau ideologi negara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tema yang diusung HTI berkaitan dengan agenda besar bangsa Indonesia pada tahun 2014, yaitu pemilihan umum (pemilu) untuk memilih anggota parlemen dan presiden periode 2014-2019. Tema yang diusung oleh HTI sebagai kelompok Islam revivalis menciptakan arus berlawanan dengan program pemerintah. Lembaga-lembaga pemerintah berusaha mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi. Sebaliknya, HTI mengampanyekan paham antidemokrasi, mengajak masyarakat untuk mencampakkan demokrasi dan memperjuangkan negara Islam (*khilafah islamiyah*). Jadi, ada dua arus wacana yang saling berlawanan di tahun 2014, yakni wacana demokrasi dari pemerintah dan wacana antidemokrasi dari HTI. Berikut ini akan digambarkan bagaimana wacana situs HTI terhadap demokrasi sebagai sebuah ideologi. HTI dalam melakukan delegitimasi wacana demokrasi mengambil sudut pandang ekonomi-politik global selain dari sudut pandang doktrin teologis, yang bersumber pada Al Quran dan Hadits, sesuatu yang lazim dilakukan oleh kelompok revivalis lainnya.

Sebagai contoh, HTI membuat plesetan slogan demokrasi yang terkenal “demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” menjadi “demokrasi itu dari *company*, oleh *company*, dan untuk *company*”. Ini terlihat pada artikel yang berjudul “Demokrasi Hanya Untuk *Company*”. Artikel ini menekankan aspek hubungan ekonomi-politik pada peristiwa pemilihan umum. Menurut HTI, untuk kesuksesan pemilu, diperlukan dana yang tidak sedikit. Calon anggota legislatif (caleg), calon wakil presiden (cawapres)

ada yang harus menyediakan modal milyaran. Donatur (para pemilik modal) menanamkan investasi atas nama sumbangan kepada partai dan caleg/capres. Sukses tidaknya seseorang dalam pemilu ditentukan jumlah dana dan pencitraan di media massa. Susah dibedakan antara biaya politik (*politic cost*) dan politik uang (*money politic*). Keduanya ibarat sebilah kepingan uang koin.

Pada artikel ini, dikutip pernyataan Rutherford B. Hayes yang menyindir demokrasi “dari *company*, oleh *company*, dan untuk *company*”. *Company* dimaksudkan perusahaan atau pemilik modal (kapitalis). Menurut HTI, pada Pemilu di negara demokrasi manapun, keterlibatan *company* selalu ada. Mereka berada di balik layar untuk mendukung sisi finansial karena partai politik (parpol) bukanlah sebuah perusahaan (Artikel “Demokrasi Hanya Untuk *Company*”, Terbit 17 April 2014). Menurut HTI, peraturan yang mengatur tentang pemilu (UU No 8 Tahun 2012) melegitimasi simbiosis antara ekonomi dan politik. Kepentingan ekonomi dan politik dalam sistem demokrasi akan senantiasa berjalan beriringan. Politik merupakan sumber untuk menghasilkan kebijakan dan aturan. Sementara ekonomi merupakan penopang utama keberlangsungan pemerintahan. Sistem demokrasi mengharuskan siapa yang berkuasa harus memiliki dukungan kuat termasuk dukungan finansial selain dukungan basis massa dan mesin politik partai. Sumbangan pemilik modal atau yang disebut juga “mahar politik” terdapat kesepakatan tersembunyi. Di berita ini juga dimunculkan perbedaan antara Islam dan demokrasi yang terletak pada asas-asasnya. Menurut artikel berjudul “Demokrasi Hanya Untuk *Company*” (Terbit 17 April 2014), HTI menceritakan

bahwa demokrasi berdasar pada kedaulatan di tangan rakyat. Rakyat berhak menentukan baik dan buruknya, serta mengatur hidupnya sendiri. Sementara Islam berdasar pada akidah Islam, kedaulatan ada di tangan Allah. HTI kemudian mengajak meninggalkan demokrasi. Menurutnya, “demokrasi itu sebagai alat atau tameng kapitalis untuk melakukan perampokan kekayaan negeri”. Demokrasi sistem yang gagal, rusak dan merusak.

HTI pada artikel berjudul “*Muballighah* Pekanbaru Setuju Menolak Demokrasi dan Berjuang Menegakkan Khilafah” mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem yang bertentangan dengan Islam. Kedua sistem tersebut berbeda dari sisi dasarnya. Adapun alasan HTI menolak demokrasi karena pertimbangan keyakinan pada ajaran Islam selain alasan dampak demokrasi yang di dalamnya rawan praktik politik uang. Berikut kutipan artikel tentang alasan menolak demokrasi.

Kesalahan fatal demokrasi adalah kewenangan manusia menggantikan peran Allah sebagai pembuat hukum, sehingga aturan kehidupan umat Islam pun berjalan sesuai dengan aturan kufur ini. Pangkal penderitaan umat tidak hanya umat Islam saja, tapi juga seluruh umat manusia karena diterapkannya sistem ekonomi kapitalis dengan sistem pemerintahan demokrasi yang sarat liberalisasi dan privatisasi (“*Muballighah* Pekanbaru Setuju Menolak Demokrasi dan Berjuang Menegakkan Khilafah”, 20 April 2014).

HTI juga menolak demokrasi dengan alasan sistem tersebut melahirkan sistem ekonomi kapitalisme yang rakus dan eksploitatif. Ia mencontohkan, tambang minyak yang banyak dikuasai asing menjadi salah satu bukti bahwa demokrasi telah melahirkan sistem kapitalisme yang hanya berpihak pada pemilik modal. Alasan HTI yang lain

adalah karena demokrasi bertentangan dengan akidah Islam.

Menurut artikel berjudul “Demokrasi Lahirkan Sistem Ekonomi Rakus dan Eksploitatif”, Terbit 21 April 2014, HTI menceritakan bahwa demokrasi bertentangan dengan akidah Islam karena demokrasi lahir dari akidah sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Akal manusia merupakan alat sekaligus sumber hukum. Inti demokrasi adalah menjadikan manusia sebagai Tuhan dalam membuat hukum artinya suara rakyat, suara Tuhan. Padahal, dalam Islam hak membuat hukum hanyalah milik Allah.

Alasan serupa juga disampaikan HTI pada artikel berita berjudul “Demokrasi Sistem Rusak, Menghasilkan Kerusakan”, Terbit 21 April 2014. Pada artikel ini, HTI menyampaikan, demokrasi merupakan sistem rusak dan hanya menghasilkan kerusakan. Demokrasi dinilai telah merampas hak Allah sebab kedaulatan tertinggi dalam Islam ada di tangan Allah bukan di tangan rakyat. Demokrasi memberikan kerusakan dan memberikan kerugian bagi rakyat karena kebijakan yang lahir berorientasi pada kepentingan elit politik dan pemilik modal. Berikut kutipannya.

Sejatinya, sistem demokrasi terbukti gagal dalam menyejahterakan rakyat, terbukti bahwa secara sistemik demokrasi melahirkan negara korporasi yang terbentuk dari simbiosis mutualisme elit politik dan pemilik modal yang merugikan rakyat. Kebijakan yang muncul bukan untuk kepentingan rakyat tapi elit pemilik modal yang mendukung, menjadi alat untuk mengembalikan investasi politik yang mahal sekaligus untuk mempertahankan kekuasaan (“Demokrasi Sistem Rusak, Menghasilkan Kerusakan”, 21 April 2014).

Dalam kaitan hubungan antara demokrasi dan Islam, selain keduanya berbeda, HTI juga tidak setuju dengan apa yang disebut oleh kelompok lain dengan istilah islamisasi demokrasi.

Ketidaksetujuan HTI dalam masalah ini diekspresikan dalam berita berjudul “Islamisasi Demokrasi?”. Pada artikel tersebut, HTI mempertanyakan kemungkinan demokrasi mengalami proses islamisasi. Alasan utama penolakan HTI terhadap islamisasi demokrasi adalah karena demokrasi itu sistem kufur. Berdemokrasi berarti mengadopsi kata demokrasi yang termasuk aktivitas *tasyabbuh* dengan orang-orang kafir. Dalam demokrasi, muslim dan kafir, laki-laki dan wanita diperlakukan sama (Artikel “Islamisasi Demokrasi?”, Terbit 25 April 2014). Alasan HTI tidak menerima demokrasi adalah karena demokrasi merupakan istilah asing yang maknanya jelas-jelas bertentangan dengan akidah dan syariah Islam. Demokrasi adalah jalan hidup, tujuan, idealitas, dan filosofi politik orang-orang kafir. HTI kemudian mengutip penjelasan dari Duane Swank yang menyatakan bahwa demokrasi adalah jalan hidup, pandangan hidup, dan filsafat politik. Menurutnya, demokrasi, baik secara istilah maupun makna, adalah sistem kufur yang haram untuk diadopsi, dipraktikkan dan disebarluaskan. Demokrasi adalah *thaghut* yang harus dienyahkan. Tidak ada islamisasi demokrasi. Islamisasi demokrasi sama artinya menyetarakan keimanan dengan kekufuran, atau memaksakan agar kekufuran menjadi bagian dari ajaran Islam. Islamisasi demokrasi sama artinya dengan memaksakan agar *thaghut* menjadi sesembahan orang-orang beriman (Artikel “Pemilu, Sulap Demokrasi Kelabui Rakyat”, Terbit 23 April 2014).

Ekspresi HTI menolak demokrasi diungkapkan antara lain dengan kata “sistem kufur”, “najis”. Kata ini (najis) populer bagi umat Islam untuk menggambarkan sesuatu haram dan

menghalangi seseorang dalam melakukan ibadah tertentu (wudhu, sholat, dan lain lain), dan biasanya ini adalah sesuatu yang menjijikkan, seperti kotoran. Pandangan HTI yang memandang demokrasi itu najis terlihat pada kutipan berikut ini.

Demokrasi adalah sistem kufur dan “*najis li dzatihi*”. Oleh karena itu, demokrasi tidak boleh dimanfaatkan, dinikmati, apalagi diadopsi sebagai jalan untuk menegakkan Islam. Sebab, Islam adalah agama sempurna yang menjelaskan semua persoalan umat manusia. (“Pemilu, Sulap Demokrasi Kelabui Rakyat”, 23 April 2014).

Menurut HTI, organisasi Islam yang menerima dan berjuang dalam demokrasi mengadopsi sistem yang salah, najis, dan kufur. HTI mengungkapkan juga fakta empiris mengenai kegagalan kelompok-kelompok Islam yang berjuang dengan demokrasi seperti *Front Islamique du Salut/The Islamic Salvation Front* (FIS) di Aljazair dan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Menurut penjelasan HTI, dari sisi fakta, gerakan-gerakan Islam yang berusaha memperjuangkan Islam melalui demokrasi nyata-nyata telah kandas dan gagal. Fakta juga menunjukkan, meskipun di antara mereka ada yang memenangkan pemilu secara demokratis, mereka tidak berdaya untuk menerapkan Islam secara *kaffah*. Bahkan ketika mereka hendak mengganti sistem demokrasi dengan sistem Islam, keberadaan mereka justru diberangus oleh musuh-musuh Islam dengan dalih menyelamatkan demokrasi (Artikel “Pemilu, Sulap Demokrasi Kelabui Rakyat”, Terbit 23 April 2014).

HTI mengkritisi logika demokrasi yang menyamaratakan kualitas seseorang, tidak memandang antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Produk demokrasi merupakan wujud dari kejahatan korporasi oleh penyelenggara negara yang dilahirkan dari sistem

sekularisme yang digunakan (Artikel “HTI Kembali Kritisi Sistem Demokrasi Indonesia”, Terbit 3 Juni 2014).

Demokrasi adalah alat untuk menjajah bangsa Indonesia. Negara yang akan membela demokrasi adalah Amerika yang memiliki kepentingan untuk melanjutkan hegemoninya, melestarikan penjajahan, mengeruk kekayaan negeri-negeri Islam. Demokrasi tidak perlu dibela dan dipertahankan oleh kaum muslimin karena demokrasi pasti akan dibela dan dipertahankan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Melalui demokrasi inilah, mereka melanjutkan hegemoninya, melestarikan penjajahan dan mengeruk kekayaan alam negeri-negeri Islam. Demokrasi sejatinya adalah alat penjajahan (Artikel “Karena Demokrasi, Kaum Muslimin Dijajah”, Terbit 3 Juni 2014).

HTI kembali menegaskan alasan penolakannya terhadap demokrasi sebagai sebuah ideologi. Ia mengungkapkan alasan penolakannya terhadap demokrasi pada artikel berjudul “Demokrasi Sistem Kufur”. Pada artikel ini, HTI menolak demokrasi karena sistem ini memberikan kesempatan orang-orang kafir untuk menjadi penguasa. Demokrasi bukan sekadar perkara teknis. Sebaliknya, demokrasi merupakan sistem keyakinan. Demokrasi telah mendudukkan hukum manusia di atas hukum Allah. Demokrasi telah memberikan hak pembuatan hukum yang merupakan hak Allah kepada manusia. Padahal seorang muslim mestinya terikat pada syariah Islam, bukan pada hukum buatan manusia.

Pada artikel berita berjudul “Kebenaran dan Kekuasaan Dalam Demokrasi”, HTI mengkritisi paham demokrasi. Menurutnya, berdemokrasi adalah pengabaian terhadap hukum Allah yang bertujuan untuk mendapatkan uang

atau kekuasaan dengan cepat. Akibatnya, sumber alam terkuras serta berhutang ke negara kapitalis. HTI menilai bahwa hukum yang dibuat melalui proses demokrasi tidak akan menghasilkan keadilan dan kebenaran (Artikel “Demokrasi Sistem Kufur”, Terbit 11 November 2014).

Adapun alasan teologis HTI menolak demokrasi adalah karena demokrasi menggiring ke perbuatan syirik, yaitu mengambil hak Allah sebagai pembuat aturan hukum; pintu masuk bagi negara-negara kafir penjajah untuk menguasai dan merampok kekayaan alam. Dengan demikian, demokrasi bertentangan dengan akidah mayoritas penduduk, sistem demokrasi juga menjadikan pemimpinnya abai terhadap nilai-nilai spiritual. Ideologi demokrasi hanya membatasi agama hanya pada urusan *private* atau personal. Demokrasi memungkinkan manusia membuat undang-undang dengan hawa nafsu dan demokrasi memecah belah umat Islam.

Dampak Demokrasi Dalam Bayangan HTI

HTI berpandangan, demokrasi tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyat. HTI mengungkapkan jumlah hutang Indonesia yang makin besar. Padahal, menurutnya, Indonesia adalah negara demokrasi terbesar di dunia Islam. Dengan mengatakan, “demokrasi di Indonesia merupakan demokrasi terbesar di dunia Islam namun kenyataan dengan diterapkan demokrasi ini, hutang Indonesia makin besar”. HTI menganggap demokrasi adalah sistem yang menyebabkan Indonesia berhutang ke negara lain. Dengan kata lain, antara demokrasi dengan kesejahteraan rakyat tidak ada keterkaitan satu sama lain (Artikel “Demokrasi Tidak

Mampu Sejahterakan Rakyat”, Terbit 22 April 2014).

Sistem demokrasi sendiri menjadi penyebab korupsi sehingga mustahil diberantas. Pandangan HTI seperti ini terlihat pada judul berita “Pemilu, Sulap Demokrasi Kelabui Rakyat” (Terbit 23 April 2014). Artikel berita ini mengatakan bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang mustahil bisa melakukan pemberantasan korupsi seperti yang dikehendaki rakyat. Alasannya adalah demokrasi membutuhkan biaya politik yang besar. Menurut HTI, pemilihan umum 2014 akan jauh lebih korup dari pemilihan umum sebelumnya. Pada pemilihan umum tahun ini (2014), partai politik bukan bagaimana merumuskan program tapi bagaimana bermain politik uang. Jadi, menurut HTI, selama pemilu bagian dari demokrasi, korupsi wajar akan terus terjadi. Menurut HTI, di beberapa wilayah Islam, demokrasi digunakan untuk mengokohkan penguasa boneka Barat. HTI mengatakan bahwa demokrasi adalah racun, tidak bisa menghilangkan nepotisme. Rekapitulasi suara sementara pemilu 2014 tingkat daerah merupakan bukti yang ke sekian kali bahwa harapan hilangnya nepotisme seperti yang diinginkan publik saat melengserkan Presiden Soeharto dengan menegakkan demokrasi, jauh panggang dari api (Artikel “Bukti Demokrasi Tak Bisa Hilangkan Nepotisme”, Terbit 1 Mei 2014).

Demokrasi menurutnya tidak akan mencapai tujuan apapun. Pada berita itu juga HTI mengaitkan bahwa demokrasi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan Amerika. Jadi, jika ada aturan atau kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan Amerika, pasti Amerika tidak akan pernah rela. Apapun tujuan yang hendak dicapai melalui jalan demokrasi

pasti akan gagal. Demokrasi tidak akan pernah rela jika ada aturan atau kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan negara penjajah terkuat saat ini yaitu Amerika (Artikel “Harapan Semu Demokrasi”, Terbit 8 Mei 2014). HTI – pada artikel ini- juga melihat implikasi pelaksanaan demokrasi pada aspek religiusitas dan teologis (agama). Dalam pandangan HTI, demokrasi dapat menggiring umat Islam ke perbuat syirik atau penyekutuan Allah karena berdemokrasi berarti manusia telah berbuat angkuh dan sombong dengan menjadi pesaing Allah dalam hal membuat aturan kehidupan manusia (Artikel “Harapan Semu Demokrasi”, Terbit 8 Mei 2014).

Demokrasi menurut HTI merupakan sistem terkejam yang gagal membangun peradaban. Kerusakan telah nampak di muka bumi akibat penerapan demokrasi. Dalam berita “Jalan Islam Bukan Jalan Demokrasi”, Terbit 17 Mei 2014, HTI juga mengatakan bahwa bangsa ini sudah berkali-kali mengadakan pemilu dan mengganti presidennya, tetapi sama sekali tidak menghasilkan perubahan. Jalan demokrasi memang tidak didesain untuk menghasilkan perubahan mendasar. Jalan demokrasi memang bisa menjadikan aktivis muslim menjadi penguasa tetapi tidak memberikan peluang untuk diterapkannya syariat Islam (Artikel “Jalan Islam Bukan Jalan Demokrasi”, Terbit 17 Mei 2014).

Pandangan bahwa demokrasi adalah sistem yang gagal juga nampak pada berita berjudul “Demokrasi Sengsarakan Rakyat Indonesia”, Terbit 27 Mei 2014. Pada berita tersebut, HTI mengatakan bahwa demokrasi telah gagal menciptakan stabilitas politik dan *clear government*. Faktanya, demokrasi lebih mementingkan para kapitalis dan investor

politik daripada masyarakat. Pemerintah eksekutif dan legislatif telah melakukan persekongkolan hanya untuk melanggengkan kekuasaannya saja tanpa memikirkan kepentingan masyarakat. HTI mengkritik bahwa di Indonesia terjadi paradoks. Kekayaan alam luar biasa melimpah tetapi rakyatnya hidup miskin dan terbelakang. Ini terjadi karena penerapan sistem demokrasi.

HTI juga mengaitkan demokrasi dengan dekadensi atau kerusakan moral masyarakat. Menurutnya, demokrasi adalah sistem zalim buatan manusia yang tidak akan membawa kesejahteraan untuk rakyat, bahkan demokrasi tidak akan membawa perubahan untuk Indonesia menjadi lebih baik. Demokrasi yang mencampakkan hukum-hukum Allah telah membawa kerusakan. Moral dan akhlak sangat rusak. Pornografi, zina, merebak di mana-mana. Bahkan, saat ini ditemukan ayah kandung memperkosa anaknya sendiri (Artikel “Indonesia Milik Allah Campakkan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal, Tegakkan Khilafah”, Terbit 28 Mei 2014). Penolakan HTI terhadap demokrasi juga disebabkan pertimbangan pemahaman atas doktrin agama. Dalam perspektif HTI, demokrasi itu adalah sistem kufur, tidak bersumber dari Allah seperti dinyatakan dalam artikel berjudul “Telanjangi Demokrasi”, Terbit 30 Mei 2014. Selain karena alasan yang bersifat ideologis berbasis pada pemahaman terhadap agama Islam tadi, HTI menolak demokrasi juga karena sistem ini diyakini tidak mampu menyejahterakan rakyat, yang sejahtera justru hanya penguasa dan pengusaha. Karena pertimbangan ini, produk demokrasi tidak akan menyejahterakan rakyat. Terkait dengan pesta demokrasi atau pemilihan umum yang

diselenggarakan oleh Indonesia tahun 2014, HTI memandang pemilu tersebut tidak akan bisa menyejahterakan rakyat Indonesia.

Demokrasi menyebabkan korupsi, melahirkan undang-undang yang lahir membela cukong, dan kepentingan korporasi milik kapitalis. Menurutnya, karena demokrasi mahal, korupsi semakin menggila. Kalau tidak ada duit, meminjam. Kalau gagal, gila. Kalau menang, lebih gila lagi hingga korupsi berjamaah. Undang-undang yang dibuat pun untuk membela kepentingan para cukong yang telah membiayai kampanye anggota DPR dan presiden. Hanya untuk kepentingan korporasi, korporasi milik para cukong, korporasi milik para kapitalis!” (Artikel “HTI Seru Warga Jakarta Campakkan Demokrasi dan Ekonomi Liberal”, Terbit 31 Mei 2014). HTI pada artikel berita ini juga memerinci kerusakan akibat demokrasi yaitu:

1. Mementingkan kuantitas bukan kualitas. Dalam demokrasi, suara seorang professor sama dengan suara seorang preman. Suara seorang artis yang tidak mengerti politik dinilai sama dengan suara seorang politisi. Suara seorang yang memilih dengan analisa sama dengan suara orang yang dibayar, sama-sama dihitung satu. Demokrasi hanya menghitung jumlah, bukan kualitas;
2. Kedaulatan semu. Hakikatnya apa yang terjadi di parlemen bukanlah mewakili suara rakyat, tetapi mewakili segelintir orang yang ‘berkepentingan’;
3. Suara Mayoritas. Demokrasi mengagungkan pendapat mayoritas. Suara mayoritas adalah kebenaran dalam klaim demokrasi;
4. Mahal dan menyuburkan korupsi. Wajar kasus korupsi terus merebak

karena partai politik dan politisi memerlukan dana sangat besar untuk modal pemilihan umum. Untuk mengembalikan biaya politik diperoleh dari mengutip anggaran proyek, jual beli kebijakan diantaranya mengeluarkan perizinan atau konsesi dengan imbalan sejumlah uang dari penerima izin atau konsesi tersebut, serta menggelembungkan anggaran belanja;

5. Hanya untuk korporasi. Partisipasi dalam demokrasi membutuhkan dana yang besar. Hal ini tertanggulangi bagi yang tidak dan kurang memiliki modal dari pengusaha dan korporasi/perusahaan. Tak heran, kebijakan-kebijakan memihak kepentingan para pengusaha dan korporasi/perusahaan;
6. Alat penjajahan. Demokrasi diusung oleh negara besar seperti Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya dalam rangka melestarikan penjajahan dan mengeruk kekayaan alam negeri negeri Islam. Demokrasi sejatinya alat penjajahan.

Demokrasi -dalam pandangan HTI- bukan menciptakan kondisi yang lebih baik tapi menciptakan kondisi yang buruk karena terbangunnya sistem korporasi. HTI mengusulkan untuk mengadopsi sistem pemerintah khilafah. Demokrasi juga dikonstruksi sebagai penyebab yang menjadikan Indonesia tetap dalam posisi belum merdeka sepenuhnya. Demokrasi telah mengubah negara Indonesia yang makmur dan kaya sumber daya alamnya menjadi negeri yang tidak pernah berhasil merdeka 100 persen dan mandiri. HTI melihat bahwa Indonesia masih dalam kondisi terjajah bukan dalam arti secara fisik tetapi secara ekonomi. Keterjajahan bangsa Indonesia ini karena dominasi

negara barat (Artikel “HTI Kembali Kritis Sistem Demokrasi Indonesia”, Terbit 3 Juni 2014).

Atas nama demokrasi, negara diarahkan oleh kepentingan modal (kaum kapitalis). Oleh karena itu, pemimpin dalam sistem demokrasi sejatinya menjalankan roda pemerintahan bukanlah berdasar keberpihakan rakyat, tetapi untuk kepentingan para elit dan kroni yang berkuasa, termasuk kepentingan pemilik modal (Artikel “Sulit Berharap Kepada Pemimpin Dari Sistem Demokrasi”, Terbit 3 Juni 2014). Sementara itu, ideologi kapitalisme sekular menihilkan peran agama dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan berbasis ideologi kapitalisme sekuler melalui modus sistem demokrasi juga menjadikan pemimpinnya mengabaikan nilai-nilai spiritual. Orientasi penyelenggaraan pemerintahan semata-mata bertumpu pada pragmatisme dan keuntungan materialistik. Akibatnya, lahirlah sosok pemimpin yang tidak memedulikan agama sebagai tolak ukur tatkala menyelenggarakan roda pemerintahan.

Ekonomi liberal merupakan pangkal masalah berbagai macam carut-marut ekonomi bangsa. Penjarahan kekayaan alam oleh para kapitalis asing, kemiskinan, terlantarnya kebutuhan masyarakat seperti pendidikan dan kesehatan adalah buah dari diterapkannya sistem ekonomi liberal karena sistem ini mengharuskan negara untuk tidak berperan dalam memelihara dan melayani kebutuhan masyarakat. Sebagai gantinya, peran tersebut diserahkan kepada swasta dalam bentuk hubungan bisnis semata (Artikel “Warga Garut Tolak Demokrasi dan Ekonomi Liberal, Serukan Khilafah”, Terbit 3 Juni 2014).

Menurut HTI, pengamalan demokrasi setidaknya menghalangi salah satu dari syarat ketakwaan yaitu mengamalkan hukum-hukum Al Quran dan Hadits, *ijma* shahabat dan *qiyas*. Jadi, menurut HTI tidak bisa dikatakan takwa bila tidak mau menjalankan syariat Islam. Mekanisme penerapan hukum Allah dalam level negara adalah dengan langsung menerapkannya tanpa perlu persetujuan mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menjelang pemilihan umum Presiden RI pada 9 Juli 2014, HTI memuat secara lengkap isi pidato ketua Dewan Pengurus Pusat HTI. Pidato tersebut disampaikan tanggal 7 Juli 2014 (2 hari sebelum pemilihan presiden/pilpres 2014), yaitu pada acara konferensi Islam dan peradaban. Judul pidatonya adalah “Campakkan Demokrasi dan Sistem Ekonomi Liberal, Tegakkan Khilafah”. Artikel itu menyampaikan bahwa demokrasi tidak bisa membawa kondisi Indonesia lebih baik. Sebaliknya, demokrasi menjadikan Indonesia bobrok dan rusak. Politik Indonesia sudah melaksanakan demokrasi dalam berbagai bentuk, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi liberal lagi. Namun, sistem demokrasi tersebut tidak bisa menjadikan Indonesia menjadi negara yang sejahtera. Indonesia gagal menjadi negara yang sejahtera. Sebaliknya, demokrasi menjadi sumber masalah.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari pandangan HTI mengenai nilai-nilai demokrasi di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai alasan HTI menolak sistem demokrasi. HTI menolak demokrasi

karena dua alasan yaitu alasan yang bersifat sosial ekonomi dan alasan atas dasar pertimbangan pemahaman agama. Secara sosial ekonomi, HTI menolak demokrasi karena ia berpandangan bahwa demokrasi tidak menciptakan kesejahteraan; yang sejahtera justru hanya penguasa dan pengusaha. Demokrasi menjadi penyebab Indonesia berhutang pada asing. Demokrasi menjadi alat penguasa dan pengusaha untuk menguras kekayaan alam negeri melindungi kepentingan Amerika. Demokrasi lahir dari ideologi kapitalis yang kufur. Demokrasi penyebab korupsi dan berorientasi pada korporasi. Dengan demokrasi, kemaksiatan akan menjadi dilema, seperti menutup lokalisasi menjadi dilema, karena ada isu HAM. Demokrasi juga dinilai melahirkan pandangan yang permisif dimana memecah belah umat. Ideologi demokrasi lahir dari sistem kapitalisme. Adapun alasan teologis HTI menolak demokrasi adalah karena demokrasi menggiring ke perbuatan syirik, yaitu mengambil hak Allah sebagai pembuat aturan hukum; pintu masuk bagi negara-negara kafir penjajah untuk menguasai dan merampok kekayaan alam. Dengan demikian, demokrasi bertentangan dengan akidah mayoritas penduduk, sistem demokrasi juga menjadikan pemimpinnya mengabaikan nilai-nilai spiritual. Dalam kaitannya dengan ibadah yang bertujuan mencetak menjadi orang yang bertakwa seperti ibadah puasa, itu –menurut HTI– tidak bisa dicapai kalau negara masih menerapkan sistem demokrasi. Pengamalan demokrasi setidaknya menghalangi salah satu dari syarat ketakwaan yaitu mengamalkan hukum-hukum Al Quran dan Hadits, *ijma* shahabat dan *qiyas*. Ideologi demokrasi hanya membatasi agama hanya pada urusan

private atau *personal*. Demokrasi memungkinkan manusia membuat undang-undang dengan hawa nafsu dan demokrasi memecah belah umat Islam.

Bahasa yang digunakan yang mendelegitimasi wacana demokrasi adalah dengan mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem haram, sistem *najis li dzatihi*, sistem kufur, *tasyabbuh bil kuffar* (mengikuti cara orang kafir), demokrasi memiliki cacat bawaan, demokrasi sistem rusak dan merusak, demokrasi lokomotif yang membawa gerbong-gerbong kemaksiatan, kemungkaran, dan kezaliman. Demokrasi memberi jalan lahirnya pemimpin boneka asing, demokrasi biang korupsi.

Saran

Secara akademik, peneliti menyarankan agar kajian mengenai alasan dari kelompok HTI menolak demokrasi perlu dilakukan, baik dengan menggunakan pendekatan (*approach*) *social construction* atau fenomenologis sehingga diharapkan bisa diketahui alasan penolakannya, dan latar belakang sosio-politik-kultural dapat diketahui. Penelitian juga penting dilakukan untuk menemukan pola interaksi kelompok HTI khususnya dalam kaitannya dengan dinamika kebangsaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Balitbang SDM Kemkominfo

karena tulisan ini adalah bagian dari tugas kuliah yang operasionalisasinya dibiayai oleh TPSDM-BALITBANG SDM. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Eriyanto atas masukan selama proses melakukan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Castells, Manuel. *The Information Age: Economy, Society And Culture Volume II, The Power of Identity*. Blackwell: Oxford, 1997.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia Menuju Transisi Demokrasi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Gee, James Paul. *An Introduction To Discourse Analysis, Theory and Method*. Second. London & NY: Routledge, 2005.
- Haqqani, Husain. "Islamists and Democracy: Cautions from Pakistan." *Journal of Democracy* 24, no. 2 (April 2013).
- Harto, Kasinyo. *Islam Fundamentalis di Perguruan Tinggi Umum, Kasus Gerakan Keagamaan Mahasiswa Universitas Sriwijaya Palembang*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2008.
- Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga*. Dialihbahasakan oleh Asril Marjohan. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1995.
- Sindhunata. *Dilema Usaha Manusia Rasional: Kritik Masyarakat Modern Ala Max Horkheimer dalam Rangka Sekolah Frankfurt*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Suseno, Frans Magnis. *Pemikiran Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Taher, Tarmizi. *Radikalisme Agama*. Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) - IAIN Jakarta, 1998.

